

Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Optimalisasi Lembaga Keuangan Non Bank bagi Wirausaha Perempuan di Kabupaten Sampang

*Ari Setyanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Indonesia

DOI: [10.46821/bharanomics.v2i2.276](https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i2.276)

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang diantaranya Koperasi Wanita dan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang memang ditujukan bagi usaha perempuan, hambatan dalam yang dijumpai dalam hal optimalisasi lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir, peran pemerintah dalam optimalisasi lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan sudah dilaksanakan dengan menyediakan anggaran bagi usaha perempuan melalui program Jalin Matra PFK maupun pengembangan Kopwan. Sedangkan rekomendasinya antara lain dalam hal pemanfaatan maupun pengembangan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks-program PNPM maupun Gerdu taskin yang mempunyai unit usaha Simpan Pinjam Perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus memfasilitasi dalam hal penyusunan regulasi atau payung hukum untuk menentukan langkah berikutnya berkaitan dengan pengembangan usaha perempuan maupun mendorong agar lembaga tersebut bisa menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersinergi mendorong, memfasilitasi dan melakukan mapping terhadap Pemberdayaan LKM sentra sebagai embrio terbentuknya koperasi baru dan sebagai LKM agar berorientasi kepada UU No 1 tahun 2013 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Lembaga Keuangan Non Bank, Optimalisasi, Wirausaha Perempuan.

Abstract:

This research uses qualitative descriptive method, i.e. a contextual research which makes human beings as instruments and adapted to the situation are reasonable in relation to the collection of data that is generally qualitative in nature. The conclusion from this study is there is some financial institutions for business women in East Java, including the cooperative Program established by women and the feminization of poverty Relief Committee was indeed intended for business women, barriers encountered in terms of the development of the non financial institutions bank for business women is not yet as well as the legal umbrella regulation mainly to institutions born of the poverty alleviation program has ended, the role of Government in the development of the financial institutions for women's efforts have been conducted to provide a budget for business women through programs established by Matra PFK are both development Kopwan. While the recommendations, among others in terms of utilization as well as Implementing development activities (UPK) ex-PNPM program as well as Gerdu taskin which has business units Save Borrow Women, the Government of East Java province or district/city Governments should facilitate in terms of drafting the regulation or the umbrella law for determining the next steps with regard to women's enterprise development as well as encourage the institution could be part of a Village-owned enterprises. The Government of East Java province or district/city Governments should work together to facilitate and mendorong efficiency of mapping against the empowerment of MFI centers as the embryo formation of new cooperatives and so as bound to Financial Services Authority in accordance with law No. 1 year 2013 about Financial Services Authority.

Keywords: Business Woman, Government Policies, Non Bank Financial Institution, Optimaizing.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Isu gender dan kemiskinan, dalam hal ini rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Bagi perempuan seringkali konsep ruang publik ini diartikan sebagai tempat kerja atau tempat berusaha daripada forum-forum di dalam komunitas. Keterlibatan dalam forum publik di dalam komunitas pun biasanya terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domestiknya, seperti arisan, pengajian atau perkumpulan keagamaan, dan PKK.

Penanggulangan kemiskinan perempuan dan anak merupakan masalah sangat serius. Data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 menunjukkan, dari sebanyak 1.230.042 rumah tangga berstatus kesejahteraan 10% terendah di Jawa Timur, 12,4% atau sebanyak 152.343 di antaranya adalah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Sebanyak 22.858 orang atau 15% di antaranya hidup sebatang kara, sedangkan sisanya sebanyak 129.485 kepala rumah tangga perempuan memikul beban tanggung jawab atas kehidupan anggota rumah tangga sebanyak 368.919 jiwa. Kecuali itu, dari data yang sama menunjukkan terdapat 5.174.675 orang yang tergolong ke dalam status kesejahteraan 10% terendah di Jawa Timur, di mana hampir separo di antaranya, 49,7% atau sebanyak 2.575.416 adalah perempuan.

Lembaga keuangan non bank, khususnya perbankan, menerapkan persyaratan yang ketat dan berhati-hati mengingat dana yang disalurkan untuk kredit adalah dana yang berasal dari pihak ketiga (deposan). Salah satu bentuk kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit adalah penggunaan kriteria 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition* dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.

Dari sisi individu masyarakat, kesulitan dalam memperoleh akses keuangan karena pelaku usaha perempuan pada umumnya kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan non bank perbankan antara lain belum memiliki usaha yang berkesinambungan, belum memiliki laporan keuangan yang standar, serta tidak memiliki agunan yang mencukupi. Sehingga perlu adanya peran *stakeholder* dalam optimalisasi lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang untuk meningkatkan aksesibilitas perempuan pada permodalan usahanya.

Dengan memberdayakan usaha perempuan yang ditunjang oleh lembaga keuangan non bank ataupun beberapa program yang digagas Pemprov Jatim seperti Program Jalur Matra maupun Pemberdayaan dan Pengembangan Perempuan Ekonomi Lokal (P3EL), Feminimisme, serta Koperasi dan UKM diharapkan perempuan mampu mendongkrak perekonomian di Jawa Timur lebih baik lagi. Tak hanya itu, kaum perempuan pun diberikan pelatihan untuk mengelola bisnis dan usahanya. Sekitar enam ratus perempuan yang memiliki UKM diberikan pelatihan manajemen bisnis dan usaha, dengan harapan adanya pemerataan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Adapun permasalahan dari penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Optimalisasi

Lembaga keuangan non bank bagi Wirausaha Perempuan di Kabupaten Sampang, antara lain:

- a. Bagaimana kondisi eksisting lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang?
- b. Apa kendala dalam optimalisasi lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang?
- c. Bagaimana strategi pemerintah dalam optimalisasi lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang?

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Optimalisasi Lembaga keuangan non bank bagi Wirausaha Perempuan di Kabupaten Sampang, antara lain antara lain:

- a. Mengetahui kondisi eksisting lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang?
- b. Mengetahui solusi dalam optimalisasi lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang?
- c. Merumuskan strategi pemerintah dalam optimalisasi lembaga keuangan non bank bagi wirausaha perempuan di Kabupaten Sampang?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2009:3) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 2003: 51).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005:60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sampang pada tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permodalan Usaha Rumah Tangga Miskin melalui UPK di Kabupaten Sampang

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat maupun rumah tangga miskin terutama di Kabupaten Sampang ada beberapa program baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Sampang yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan

diantaranya adalah terbentuknya lembaga keuangan yang merupakan produk dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dimana program ini berakhir pada tahun 2014.

PNPM merupakan program bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana bantuan ini oleh pemerintah daerah ditujukan kepada kecamatan yang wilayahnya memiliki jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak. Bantuan yang diberikan berupa dana hibah dari pemerintah untuk kegiatan fisik atau sarana prasarana dan kegiatan ekonomi yang dananya akan kembali kepada UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Dana tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup UPK, perputaran kembali pinjaman bagi masyarakat dan apabila sisa hasil usaha perputaran jasa pinjaman UPK mencukupi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sarana prasarana. Kegiatan ekonomi ini pun juga dibagi kembali menjadi dua peruntukkan.

Kegiatan ekonomi yang masuk dalam kegiatan PNPM diantaranya kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) artinya kegiatan ini hanyalah diperuntukkan kaum perempuan saja. Dengan memberi kesempatan bagi perempuan berpartisipasi menerima bantuan dari PNPM, sekaligus membantu memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong pengurangan rumah tangga miskin. Disamping itu ada juga kegiatan Usaha Ekonomi Produktif yang tujuannya mengembangkan potensi pelaku kegiatan UEP di pedesaan dengan meningkatkan kualitas teknologi produksi, meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi tepat guna hingga memberi kemudahan akses informasi pasar. UPK sendiri adalah mitra kerja atau yang membantu mewujudkan keinginan masyarakat yang berharap bantuan dari PNPM, disetiap wilayah kecamatan yang memperoleh bantuan PNPM umumnya terdapat UPK yang juga didampingi Fasilitator Kecamatan.

Menurut pejabat Bapemas Kabupaten Sampang pada kegiatan FGD menyatakan bahwa pada tahun 2016 masih terdapat aset kurang lebih 12 milyar rupiah yang dimiliki oleh UPK di Kabupaten Sampang dan dengan berakhirnya PNPM disamping itu masih belum adanya payung hukum atau regulasi yang mengatur maka yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang hanya pembinaan terhadap UPK tersebut.

Saat ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bapemas Kabupaten Sampang untuk menanggulangi kemiskinan yang ditujukan untuk perempuan diantaranya adalah diadakannya berbagai pelatihan yang dapat menunjang usaha perempuan, misalnya pelatihan membuat maupun menjahit mulai dari proses produksi sampai pemasarannya, mengingat masih banyaknya perempuan di Kabupaten Sampang terutama yang berada di pedesaan mempunyai SDM yang rendah sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas SDM terutama kaum perempuan maka pembinaan maupun pelatihan masih sangat dibutuhkan dengan harapan kaum perempuan di Kabupaten Sampang yang kurang mampu akan lebih berdaya.

Pemberdayaan UKM melalui Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Sampang

Upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meretas problem akses permodalan masyarakat lapisan bawah, menjadi bukti kesungguhannya. Kemudahan akses modal antara lain diberikan kepada pelaku usaha yang baru lulus dari perguruan

tinggi (*fresh graduated*) dan masih merintis usahanya melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang, program perkuatan kredit dana bergulir dikemas menjadi stimulan berwirausaha bagi masyarakat akan yang tidak dikhususkan pada usaha perempuan namun dalam kenyataannya pelaku usaha dimaksud lebih banyak dilakukan oleh para wirausaha perempuan di bidang makanan, batik maupun konveksi. Beragam rintisan usaha barupun muncul bersamaan dengan dijalankannya program yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sampang. Salah satu terobosan daerah ini adalah memodifikasi persyaratan kredit bagi usaha mikro. Semula, kredit yang disalurkan tanpa agunan justru memicu persepsi keliru di masyarakat. Dana yang seharusnya bisa digulirkan kepada pelaku usaha lain, malah dianggap hibah yang tidak perlu dikembalikan. Akibatnya, dana itu pun macet di tengah jalan.

Kondisi tersebut memicu ide untuk menjadikan garansi personal sebagai semacam agunan, dimana pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan untuk mengakses bantuan permodalan meski belum memiliki badan hukum dan kelengkapan administratif lainnya, “garansi personal” bisa didapatkan dari pegawai negeri sipil atau kepala desa setempat.

Untuk memastikan validitas pemohon kredit, Pemkab melakukan restrukturisasi tim survei dengan melibatkan bagian perekonomian, dinas perindustrian perdagangan dan pertambangan, unsur perbankan (Bank Jatim dan BPR Bakti Artha Sejahtera), dan bidang-bidang di lingkup Dinkop UKM Kabupaten Sampang dengan maksud agar hasil survei lebih objektif dan akuntabel. Standar operasional prosedur penyaluran kredit pun dibuat lebih sederhana dan mudah diakses.

Dalam hal menjembatani UMKM dengan Dinkop UKM, Pemerintah Kabupaten Sampang menempatkan tenaga konsultan bisnis (TKB) di setiap kecamatan. Tugas TKB antara lain mendampingi proses penyusunan proposal kredit sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perbankan. Juga memberikan konsultasi terkait aspek produksi, manajemen, pemasaran, dan permodalan. Sekilas, program ini tidak jauh beda dengan upaya yang dilakukan daerah lain.

Cikal bakal keberadaan TKB berawal dari program *Business Development Service* (BDS) pada 2001. Setelah berjalan lima tahun yaitu pada tahun 2006, BDS mengembangkan pilot project yang pada gilirannya berkembang menjadi TKB di enam titik (kecamatan). Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sampang memperluas cakupan program sekaligus merekrut tenaga *fresh graduated* untuk menjadi TKB, Kompetensi dasar yang disyaratkan bagi personel TKB adalah lulusan (minimal) diploma tiga (D-3), memiliki keterampilan dasar sebagai konsultan, serta memiliki kemauan kuat dalam melakukan pendampingan. Personel TKB terpilih kemudian mengikuti upgrading untuk pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan.

Setiap TKB ditugaskan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan pada satu wilayah kecamatan. Untuk memaksimalkan fungsi dan perannya, setiap TKB diwajibkan mendampingi sedikitnya 10 UMKM. Pada Kabupaten Sampang rata-rata terdapat 20 UMKM dan wira usaha baru (WUB) di setiap kecamatan, khusus untuk WUB, syarat pengajuan kredit bisa dilakukan dengan menjaminkan ijazah.

Kendati telah melewati tahap upgrading, personel TKB tetap harus beradaptasi dengan beragam tantangan di lapangan. Anggapan keliru yang

menyamakan dana bergulir dengan hibah, masih cukup melekat di benak masyarakat, namun berkat keuletan dan ketekunan personel TKB, persepsi keliru itu perlahan mulai diluruskan. Pendampingan yang dilakukan oleh TKB secara berkala terbukti efektif dalam membentuk kemandirian dan membangun kesadaran pelaku UMKM.

Pengembangan Wira Usaha Baru Perempuan Menjadi Kopwan di Kabupaten Sampang

Menurut Kabid. Pengembangan UKM Diskop dan UKM Kabupaten Sampang, program pemberdayaan usaha perempuan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 diantaranya adalah melakukan pembinaan dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha pada sentra makanan maupun batik sedangkan untuk Koperasi Wanita dilakukan pembinaan dalam hal pengelolaan administrasi keuangan terhadap 186 Koperasi Wanita. Dalam hal dukungan finansial terdapat pinjaman melalui program koordinasi penggunaan dana pemerintah yaitu dana bergulir dan untuk mendorong para pelaku usaha perempuan agar konsisten dalam hal pembayaran pinjaman dimana sebelum tahun 2016 masih diberlakukan pinjaman tanpa jaminan maka mulai tahun 2016 diharuskan ada jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dalam hal pembinaan bagi UKM disediakan juga tenaga konsultan bisnis (TKB) yang berada di kecamatan yang berjumlah 15 orang. Adapun pelaku usaha perempuan yang banyak mendapat dana bergulir dimaksud diantaranya usaha perempuan dibidang pertokoan, pertanian dan peternakan.

Menurut data yang diperoleh dari dokumen RKPD Dinkop dan UKM Kabupaten Sampang Tahun 2015, menyatakan bahwa sasaran ketiga yaitu "Meningkatnya Jumlah BPR / LKM (BPR/LKM aktif)". Capaian sasaran tersebut dilaksanakan dengan program Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, perhitungan capaian dapat digambarkan bahwa indikator pertama yang diukur adalah jumlah BPR/LKM (Kelompok) aktif target RPJM 8 LKM terealisasi 10 LKM melebihi target RPJM atau mencapai (125,00%) sedangkan Jumlah keseluruhan dari 35 LKM yang aktif ada 10 LKM atau mencapai (28,57) rata-rata prosentase capaian sasaran (125,00%) dengan memperoleh predikat sangat baik.

Namun demikian meskipun indikator diatas rata-rata 90% tapi masih perlu mendapat perhatian yang lebih untuk upaya penyempurnaan akan menjadi perhatian guna perencanaan dan perbaikan kinerja di masa mendatang. Sedangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan diperlukan penguatan ekonomi rakyat/masyarakat yang berbasis potensi lokal melalui pengembangan sentra industri kecil/UMKM dengan sasaran meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif. Strategi Program yang digunakan adalah Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dengan tujuan dan sasaran kebijakan memberdayakan LKM sebagai akses permodalan masyarakat, sedangkan untuk perhitungan capaian dapat digambarkan dalam jumlah usaha mikro dan kecil serta indikator kedua yakni pertumbuhan minat wirausaha baru.

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Indikator Jumlah Usaha Mikro Kecil dan menengah Non BPR merupakan parameter untuk mengetahui peningkatan ekonomi Kabupaten Sampang dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Sampang pada tahun 2014 jumlah UMKM sebanyak 27.130, sedangkan pada tahun 2015 bertambah sebesar 280

UMKM dengan jumlah total 27.410 UMKM atau mencapai (98,98%) didasarkan pada pemberian pelatihan pada para usaha pemula yang telah diberikan pemberdayaan bimbingan, pelatihan juga fasilitasi kemudahan prasarana usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Sehingga memberi tambahan geliat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang semakin membaik dan tentunya akan menyerap tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang. Indikator tersebut memperoleh katagori baik

Indikator pertama yang diukur adalah jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah target 27,335 Usaha Mikro Kecil (UMK) teralisasi 27.108 Usaha Mikro Kecil (UMK) atau mencapai (99.17%), sedangkan Jumlah Keseluruhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) target RPJM 27.405 UMKM teralisasi 27.410 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melebihi target RPJM atau mencapai (100.02%).

Indikator Kedua yakni Pertumbuhan Minat Wirausaha Baru

Indikator kedua adalah jumlah pertumbuhan minat wira usaha baru dengan target 750 WUB terealisasi 970 atau mencapai (129.33%) sedangkan target 2014 jumlah WUB ada 500 terealisasi 760 WUB atau mencapai (152.00%) jadi ada peningkatan 260 WUB.

Dari 2 (dua) indikator tersebut rata-rata prosentase capaian sasaran (98,06%) memperoleh katagori baik. Pada Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dengan kegiatan pemberdayaan lembaga keuangan mikro (LKM) dan sentra. Permasalahannya adalah terjadi pada belanja perjalanan dinas luar Ke OJK di Provinsi dalam rangka Sosialisasi dan pengurusan badan hukum LKM tidak terlaksana karena LKM kurang memenuhi syarat dan belanja cetak untuk buku organisasi dan usaha LKM terealisasi 28 buku dari target 36, solusinya adalah melakukan mapping terhadap Pemberdayaan LKM sentra sebagai embrio terbentuknya koperasi baru dan sebagai LKM yang berorientasi kepada OJK sesuai dengan UU No 1 tahun 2013 tentang OJK.

Apabila mengamati capaian kinerja Dinkop dan UKM dalam rangka mengembangkan LKM yang ditujukan untuk menunjang wira usaha baru dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang sudah cukup baik namun wira usaha baru tersebut masih belum bersifat khusus yang diperuntukan bagi usaha perempuan mengingat perempuan mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi untuk masalah kemiskinan.

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Sampang

Dalam kegiatan FGD terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang merupakan satu program inovasi pengentasan kemiskinan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan program Jalin Matra di Kabupaten Sampang pada tahun 2015 terdapat 42 desa penermima bantuan yang tersebar di 8 Kecamatan, antara lain Sampang, Torjun, Pengarengan, Sreseh, Camplong, Omben, Sokobanah, dan Kecamatan Banyuates. Bantuan akan disalurkan ke kelompok yang terdiri dari 10 sampai dengan 20 orang dimana penerimanya diberikan berdasarkan *by name by addres*. Sedangkan bantuannya, berupa bantuan modal usaha seperti bantuan

hewan ternak kambing, bantuan peralatan untuk usaha perdagangan maupun usaha konveksi. Dari jumlah total 42 desa tersebut, tercatat ada 1.592 penerima, setiap penerima dianggarkan sebesar Rp. 2,5 juta, sehingga total dana yang dikucurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sampang sekitar Rp. 4,9 miliar. Dalam pelaksanaannya tidak ada sanksi khusus apabila penerima bantuan penerima bantuan Jalin Matra tersebut gagal dalam usahanya, namun penerima yang gagal menjalankan usahanya tidak akan didaftar kembali sebagai penerima manfaat di tahun berikutnya.

Program Jalin Matra PFK pada tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Sampang ditujukan kepada 508 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) di Kecamatan Omben, di 10 desa, yakni Desa Kebun Sareh, Karang Nengger, Gersempal, Meteng, Madulang, Kamondung, Tambak, Jrangoan, Angsokah, dan Desa Rongdalem. Sementara kegiatan Bantuan RTSM, dialokasikan kepada 208 RTSM di dua desa, dan di empat desa untuk kegiatan PK2. Program Jalin Matra PFK dilaksanakan melalui:

- a. Fasilitasi pengembangan Usaha Produktif KRTP
- b. Fasilitasi penguatan modal sosial KRTP melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris.
- c. Pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir maupun fasilitasi permodalan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia KRTP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka disimpulkan bahwa: (1) Dalam kenyataannya masih terdapat beberapa koperasi wanita yang tidak aktif maupun stagnan yang disebabkan karena permasalahan sumberdaya manusia pelaku koperasi wanita yang relatif masih rendah terutama terjadi pada koperasi wanita yang terdapat di perdesaan yang jauh dari pusat kota disamping itu masalah permodalan dan masih ketergantungannya pada pemerintah. (2) Terdapat lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan yang merupakan ex program PNPM yaitu Simpan Pinjam Perempuan yang melekat pada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), dimana dalam perkembangannya setelah program PNPM berakhir maka berhentilah semua kegiatan simpan pinjam perempuan tersebut padahal sebenarnya asset yang dimiliki baik berupa gedung dan modal masih cukup besar. (3) Disamping lembaga keuangan non bank mikro tersebut sebenarnya terdapat juga program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang memang ditujukan bagi usaha perempuan. (4) Salah satu hambatan dalam yang dijumpai dalam hal pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir, sehingga walaupun mempunyai asset yang cukup besar namun tidak bisa melakukan kegiatan yang konkrit bagi pengembangan usaha perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Amira. (2012). *Membangun E-Learning dengan Learning Management System Moodle*. PT Berkah Mandiri Globalindo.

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitan Sosial*. Ghalia.
- Nurastuti, W. (2011). *Teknologi Perbankan*. Graha Ilmu.
- Panggabean, R. (2005). *Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi Koperasi dan UKM*. Infokop
- Parker, B. J. (2010). *A Conceptual Framework for Developing the Female Entrepreneurship Literature*.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Reijonen, H., & Kompulla, R. (2007). Perception of Success and its Effect on Small Firm Performance. *Journal of Small Business and Enterprise Development*.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwitri. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Subarsono. (2005). *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Tambunan, T. (2009). Women Entrepreneurship in Asian Developing Countries: Their Development and Main Constraints. *Journal of Development and Agricultural Economics*.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Isu-isu Penting*. Penerbit LP3ES.